

**EVALUASI PELAKSANAAN PKH UNTUK MENYEJAHTERAKAN  
MASYARAKAT MISKIN DI KELURAHAN BINTORO DEMAK**

Yuliana Ulfa Amalia, Ari Subowo

**Program Studi S1 Administrasi Publik**

**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro**

**Jalan Prof. Soedarto, S.H., Tembalang, Kota Semarang, Kode Pos 1269**

**Telepon (024) 7465407, Faksimile (024) 7465405**

**Laman: [www.fisip.undip.ac.id](http://www.fisip.undip.ac.id) Email: [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)**

---

**ABSTRACT**

*The Family Hope Program (Program Keluarga Harapan/PKH) is one of the Indonesian government's efforts to alleviate poverty through conditional cash transfers to low-income families. Evaluating the implementation of this program is essential to assess its effectiveness in improving the welfare of poor communities, particularly in Bintoro Sub-district, Demak District, Central Java. This study aims to evaluate the implementation of PKH using the input–process–output evaluation model developed by Bridgman and Davis. A descriptive qualitative approach was employed, with data collected through interviews, observations, and documentation. The results indicate that PKH implementation in Bintoro has had a positive impact on reducing poverty rates and increasing access to basic services such as education and healthcare. However, several challenges remain, including limited human resources, delays in fund disbursement, technical issues in the e-PKH data entry system, and instances of aid misuse by some Beneficiary Families (KPM). Therefore, improvements in program management, capacity building for social facilitators, and strengthening of monitoring and evaluation systems are necessary to ensure that the program operates more optimally and reaches its intended targets.*

**Keywords:** PKH, Program Evaluation, Poverty, Community Welfare.

## ABSTRAK

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu upaya pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan melalui bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin. Evaluasi terhadap pelaksanaan program ini penting dilakukan untuk menilai efektivitasnya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin, khususnya di Kelurahan Bintoro, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan PKH dengan menggunakan model evaluasi *input-process-output* dari Bridgman dan Davis. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan PKH di Kelurahan Bintoro telah memberikan dampak positif dalam menurunkan angka kemiskinan serta meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Namun demikian, masih terdapat berbagai kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia, keterlambatan pencairan bantuan, masalah teknis dalam penginputan data e-PKH, serta penyalahgunaan bantuan oleh sebagian Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Oleh karena itu, diperlukan peningkatan manajemen pelaksanaan, penguatan kapasitas pendamping sosial, dan sistem monitoring yang lebih optimal agar program dapat berjalan secara efektif dan tepat sasaran.

**Kata kunci:** PKH, Evaluasi Program, Kemiskinan, Kesejahteraan Masyarakat.

## **PENDAHULUAN**

Kemiskinan merupakan permasalahan multidimensional yang hingga kini masih menjadi tantangan utama pembangunan di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Meskipun pertumbuhan ekonomi nasional menunjukkan tren positif, belum mampu secara signifikan mengurangi angka kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan sosial. Ketimpangan distribusi pendapatan dan rendahnya akses terhadap layanan dasar menjadi indikator bahwa keberhasilan pembangunan belum sepenuhnya dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa pandemi COVID-19 pada tahun 2020 memperburuk kondisi sosial ekonomi nasional, yang menyebabkan peningkatan angka kemiskinan. Meski tren pemulihan ekonomi mulai terlihat pada tahun-tahun berikutnya, kemiskinan tetap menjadi isu struktural yang memerlukan intervensi kebijakan yang berkelanjutan dan tepat sasaran. Salah satu strategi yang ditempuh

pemerintah adalah melalui Program Keluarga Harapan (PKH), yaitu program bantuan sosial bersyarat yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga miskin, khususnya pada aspek pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.

PKH merupakan bagian dari program perlindungan sosial yang menargetkan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan kriteria tertentu, seperti memiliki ibu hamil, anak usia sekolah, penyandang disabilitas, atau lanjut usia. Tujuan utama PKH adalah mendorong perubahan perilaku positif dan kemandirian keluarga miskin dalam mengakses layanan dasar serta memperbaiki kondisi sosial ekonomi mereka. Implementasi program ini didukung oleh regulasi formal, antara lain Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan, serta menjadi bagian dari upaya pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Di Kabupaten Demak, Program Keluarga Harapan telah

berjalan sejak beberapa tahun terakhir dan mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Namun demikian, pelaksanaannya tidak lepas dari berbagai tantangan, seperti keterbatasan jumlah pendamping sosial, keterlambatan pencairan dana bantuan, permasalahan teknis dalam sistem e-PKH, serta ketidaktepatan penggunaan bantuan oleh KPM. Berbagai kendala tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas pelaksanaan program dan sejauh mana PKH mampu memberikan kontribusi nyata dalam mengurangi kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin.

Kelurahan Bintoro, Kecamatan Demak, dipilih sebagai lokasi penelitian karena merupakan salah satu wilayah yang menjadi fokus pelaksanaan PKH dengan jumlah KPM yang relatif tinggi. Berdasarkan pengamatan awal dan data yang tersedia, implementasi PKH di wilayah ini telah menunjukkan dampak terhadap penurunan angka putus sekolah dan

peningkatan akses terhadap layanan kesehatan. Namun, tantangan pelaksanaan tetap ada dan perlu dianalisis secara komprehensif.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Bintoro dengan menggunakan model evaluasi kebijakan *input-process-output* dari Bridgman dan Davis. Evaluasi ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai keberhasilan maupun hambatan pelaksanaan PKH di tingkat lokal serta menjadi masukan bagi peningkatan efektivitas program ke depan. Peneliti tertarik untuk mengevaluasi pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam upaya menyejahterakan masyarakat miskin di Kelurahan Bintoro Kecamatan Demak Kabupaten Demak?

## **TUJUAN PENELITIAN**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)

dalam menyejahterakan masyarakat miskin di Kelurahan Bintoro Kecamatan Demak Kabupaten Demak.

## **KAJIAN TEORI**

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan bentuk konkret dari kebijakan publik dalam bidang perlindungan sosial yang berorientasi pada penanggulangan kemiskinan melalui bantuan sosial bersyarat. Dalam konteks ini, kebijakan publik dipahami sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi masalah publik, sebagaimana dikemukakan oleh Dunn (2003), bahwa kebijakan publik adalah suatu keputusan yang berorientasi pada pemecahan masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Implementasi kebijakan seperti PKH tidak hanya bergantung pada ketepatan desain program, tetapi juga pada efektivitas pelaksanaan di lapangan, yang mencakup proses, aktor pelaksana, serta sumber daya yang terlibat.

Untuk menilai keberhasilan implementasi suatu kebijakan, diperlukan model evaluasi yang sistematis. Salah satu model yang digunakan dalam penelitian ini adalah model evaluasi *input–process–output* yang dikembangkan oleh Bridgman dan Davis (2004). Model ini memungkinkan evaluasi dilakukan dengan menelaah tiga aspek utama, yaitu: input (sumber daya yang digunakan, seperti SDM, dana, dan perangkat pendukung), process (mekanisme pelaksanaan program, termasuk alur kegiatan, koordinasi, dan sistem monitoring), serta output (hasil langsung yang diperoleh dari pelaksanaan program). Evaluasi terhadap ketiga aspek ini bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana pelaksanaan kebijakan telah sesuai dengan tujuan awal serta kendala apa

saja yang menghambat efektivitasnya.

Selain itu, konsep kesejahteraan sosial menjadi kerangka penting dalam memahami tujuan akhir dari PKH. Menurut Suharto (2005), kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar manusia yang mencakup pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan partisipasi dalam kehidupan sosial. Program

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam menyejahterakan masyarakat miskin di Kelurahan Bintoro, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak. Model evaluasi yang digunakan mengacu pada kerangka *input-process-output* dari Bridgman dan Davis, yang memungkinkan peneliti menganalisis secara menyeluruh aspek-aspek sumber daya, pelaksanaan, serta hasil dari program tersebut. Lokasi penelitian dipilih secara purposif

seperti PKH berupaya menjamin terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat miskin agar mereka dapat keluar dari siklus kemiskinan dan menjadi lebih mandiri secara sosial maupun ekonomi. Oleh karena itu, kajian ini tidak hanya menilai keberhasilan administratif program, tetapi juga bagaimana program ini berdampak terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin di tingkat lokal.

berdasarkan kriteria intensitas pelaksanaan program, jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM), serta akses terhadap informan yang relevan. Informan dalam penelitian ini terdiri dari pendamping sosial PKH, koordinator PKH tingkat kecamatan, perwakilan dari Dinas Sosial Kabupaten Demak, dan beberapa anggota KPM yang menjadi penerima langsung bantuan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi. Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi primer

dari para pelaksana dan penerima program. Observasi dilakukan terhadap kegiatan pendampingan, pencairan bantuan, dan pelaksanaan pertemuan rutin KPM. Sementara itu, dokumentasi digunakan untuk melengkapi data melalui pengumpulan dokumen administratif, laporan pelaksanaan, serta catatan evaluasi program dari instansi terkait.

Data dianalisis menggunakan model analisis interaktif dari Miles

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Evaluasi pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Bintoro, Kecamatan Demak, menunjukkan bahwa program ini memberikan kontribusi positif dalam menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya melalui peningkatan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan. Namun, pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal karena masih menghadapi sejumlah kendala dalam aspek input, proses, maupun output.

### **a. *Input***

dan Huberman yang terdiri dari tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Untuk memastikan validitas data, peneliti menerapkan triangulasi sumber dan teknik, dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi guna memperoleh gambaran yang akurat dan objektif terhadap pelaksanaan PKH di wilayah penelitian.

Pada aspek **input**, ditemukan keterbatasan sumber daya manusia, terutama dalam jumlah dan beban kerja pendamping sosial. Rasio antara jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan pendamping tidak ideal, yang berdampak pada kurang maksimalnya proses pendampingan. Selain itu, ketersediaan sarana dan prasarana pendukung, seperti perangkat teknologi dan koneksi internet untuk penginputan data e-PKH, masih terbatas dan sering mengalami gangguan teknis, yang menghambat kelancaran administrasi program.

## **b. *Process***

Dalam aspek **proses**, pelaksanaan program secara umum telah mengikuti mekanisme yang ditetapkan, mulai dari perencanaan, validasi data, hingga penetapan KPM. Namun, beberapa persoalan masih kerap muncul, seperti keterlambatan pencairan bantuan yang berdampak pada ketidakpastian penerimaan dana oleh KPM. Selain itu, proses verifikasi dan input data melalui sistem e-PKH sering mengalami kendala teknis seperti server down atau kesalahan sistem, yang menghambat efektivitas pelaksanaan di lapangan. Pendampingan yang dilakukan juga belum merata karena beban kerja yang tinggi, sehingga tidak semua KPM mendapatkan edukasi yang cukup mengenai pemanfaatan bantuan.

## **c. *Output***

Adapun pada aspek **output**, pelaksanaan PKH terbukti berpengaruh dalam menekan angka kemiskinan dan memperbaiki kondisi sosial masyarakat. Sebagian besar

KPM mengalami peningkatan dalam akses pendidikan anak dan pemanfaatan layanan kesehatan ibu dan balita. Selain itu, terdapat dampak positif terhadap lansia dan penyandang disabilitas yang juga menjadi komponen sasaran program. Meskipun demikian, terdapat pula indikasi penyalahgunaan dana bantuan oleh sebagian KPM yang tidak menggunakannya sesuai dengan peruntukan, seperti untuk konsumsi non-produktif.

Secara keseluruhan, pelaksanaan PKH di Kelurahan Bintoro menunjukkan keberhasilan yang cukup signifikan dalam aspek hasil (output), meskipun masih terdapat kelemahan dalam aspek input dan proses yang perlu diperbaiki. Upaya peningkatan kapasitas pendamping sosial, perbaikan sistem administrasi e-PKH, serta penguatan monitoring dan evaluasi secara berkala menjadi kunci penting dalam mewujudkan program yang lebih optimal dan tepat sasaran.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Bintoro Kecamatan Demak Kabupaten Demak, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) telah berjalan dengan baik. Kesimpulan ini diperoleh berdasarkan analisis yang selaras dengan fenomena yang ditemukan, yaitu sebagai berikut:

### **a. *Input***

Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Bintoro dari aspek sumber daya khususnya Sumber Daya Manusia (SDM) belum sepenuhnya memenuhi ketentuan yang berlaku. Hal ini terlihat dari masih adanya Pendamping Sosial PKH yang menangani lebih dari 300 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH melebihi jumlah ideal yang ditetapkan, yaitu 200-300 KPM per-pendamping. Meskipun demikian, para pendamping telah direkrut sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 1 Tahun 2018 Pasal 10, dan telah memiliki sertifikat resmi dari

Kementerian Sosial RI melalui kegiatan diklat dan bimtek. Dari sisi sarana dan prasarana pelaksanaan PKH di Kelurahan Bintoro dapat dikatakan sudah memadai. Hal ini ditunjukkan dengan tersedianya fasilitas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial yang merata, serta adanya modul pendampingan dari Kemensos RI yang digunakan sebagai panduan dalam pelaksanaan tugas Pendamping Sosial PKH terhadap KPM PKH.

### **b. *Process***

Proses pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan prosedur serta mekanisme yang tercantum dalam pedoman pelaksanaan PKH, mulai dari tahap perencanaan hingga pendampingan. Namun, pada tahap validasi data khususnya saat penginputan ke dalam aplikasi e-PKH, Pendamping Sosial PKH menghadapi kendala akibat gangguan pada *server* aplikasi tersebut. Selain itu, terdapat hambatan lain yang bersumber dari dokumen kependudukan yang rusak atau hilang terutama dialami oleh

masyarakat lanjut usia (lansia) yang menyebabkan keterlambatan atau kesulitan dalam proses verifikasi data.

### **c. Output**

Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) memberikan dampak terhadap penurunan angka kemiskinan, meskipun belum secara langsung menyelesaikan permasalahan kemiskinan secara menyeluruh. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) merasa terbantu terutama dalam pemenuhan

kebutuhan di bidang pendidikan dan kesehatan. Selain itu, pelaksanaan PKH juga turut mendorong peningkatan pendapatan keluarga karena beberapa KPM telah memanfaatkan dana bantuan sebagai modal usaha. Selanjutnya, dalam hal pemanfaatan fasilitas, KPM PKH di Kelurahan Bintoro menunjukkan peningkatan partisipasi dalam mengakses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial secara lebih rutin dan teratur.

## **SARAN**

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Bintoro Kecamatan Demak Kabupaten Demak, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Upaya mengatasi beban kerja yang berlebih pada Pendamping Sosial PKH, disarankan agar instansi terkait melakukan peninjauan ulang terhadap jumlah pendamping yang bertugas. Penambahan jumlah pendamping dapat membantu meningkatkan

efektivitas dan kualitas layanan pendampingan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM), serta memastikan bahwa rasio pendamping dan KPM sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Pemerintah dan pihak pelaksana perlu melakukan peningkatan dan pemeliharaan terhadap sistem aplikasi e-PKH guna menghindari gangguan teknis yang dapat menghambat proses validasi dan verifikasi data. Penguatan infrastruktur teknologi informasi menjadi penting untuk

mendukung kelancaran administrasi program secara digital.

3. Disarankan agar program PKH tidak hanya fokus pada bantuan tunai, tetapi juga memperkuat aspek pemberdayaan ekonomi KPM melalui pelatihan kewirausahaan, pengelolaan keuangan keluarga, dan akses terhadap program pemberdayaan lainnya. Dengan demikian, KPM dapat lebih mandiri secara

ekonomi dan perlahan keluar dari kondisi kemiskinan.

4. Diperlukan kegiatan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan program di lapangan, baik dari segi administrasi, pelaporan, maupun efektifitas dampaknya. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan PKH berjalan sesuai tujuan dan dapat terus ditingkatkan berdasarkan temuan dan dinamika yang ada di masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkahar, & Yuwono, T. (2002). *Kebijakan Publik: Konsep & Strategi*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Adawiyah, E. (2020). Kemiskinan dan Faktor-Faktor Penyebabnya. *Journal of Social Work and Social Service*, 1(1), 43–50.
- Akbar, M. F., & Mohi, W. K. (2018). *Studi Evaluasi Kebijakan (Evaluasi Beberapa Kebijakan di Indonesia)*. Gorontalo: Ideas Publishing.
- Alexandri, M. B. (2020). Evaluasi Kebijakan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Cakung Jakarta Timur Tahun 2019. *Jurnal Moderat*, 6(2), 237–244.  
<https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderat/article/view/3275>

- Anggara, S. (2018). *Kebijakan Publik*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Arimbi, Y. D. (2022). Kecemburuan Sosial Masyarakat Non Penerima Manfaat PKH di Dusun Pringroto Desa Punjung Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan. *Jurnal Pengabdian UntukMu NegeRI*, 6(1), 163–167.  
<https://doi.org/10.37859/jpum.v6i1.3280>
- Arthamevia, N., & Sukmana, H. (2022). Analysis of the Family Hope Program. *Indonesian Journal of Public Policy Review*, 20, 1–10.  
<https://doi.org/10.21070/ijppr.v20i0.1250>
- Asmara, C. (2020). 4 Penyebab Orang Miskin RI Bisa Bertambah Jadi 26,42 Juta. Diakses pada 14 Februari 2023, dari <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200715145910-4-172922/>
- Asmoro, A., dkk. (2021). Implementasi Program Keluarga Harapan Di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 10(3).  
<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/31473>
- Badan Pusat Statistik. (2022). Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia Tahun 2007–2022. <https://www.bps.go.id/subject/23/kemiskinan-dan-ketimpangan.html>
- Badan Pusat Statistik Kota Semarang. (2022). *Kota Semarang dalam Angka* 2022. <https://semarangkota.bps.go.id/publication/2022/02/25/b4fc35189dd9d76b896dcbf3/>
- Badan Pusat Statistik Kecamatan Semarang Timur. (2022). *Kecamatan Semarang Timur dalam Angka* 2022. <https://semarangkota.bps.go.id/publication/download.html>

- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. (2022). Jumlah Penduduk Miskin di 6 Kota Besar di Jawa Tengah Tahun 2021–2022. <https://jateng.bps.go.id/indicator/23/34/1/kemiskinan.html>
- Fachrudin, M. A., Taufiq, A., & Astuti, P. (2017). Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Wonosobo Tahun 2015–2017. *Journal of Politics and Government Studies*, 7(1), 1–26.
- Gunawan, I. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Herliani, H., & Setiawati, B. (2022). Evaluasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Bidang Pendidikan. *JAPB*, 5(1), 243–255.
- Herlinda. (2022). Strategi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. <http://eprints.ipdn.ac.id/7304/>
- Juliani, L., dkk. (2023). Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Penanggulangan Kemiskinan. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(8).
- Kementerian Sosial. (2019). Jumlah Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Sosial PKH. <https://kemensos.go.id/program-keluarga-harapan-pkh>
- Kementerian Sosial RI. (2019). Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai Program Keluarga Harapan.
- Kementerian Sosial. (2021). *Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Tahun 2021–2024*.
- Kompas TV Jateng. (2023). Rp19 Miliar Dana PKH Disalurkan. <https://www.kompas.tv/amp/article/374310/videos/>
- Lestari, A. P. (2021). Koordinasi Penyaluran Bantuan Program

- Keluarga Harapan di Kota Kendari. *Public Administration and Government Journal*, 1(1).  
<https://ojs.uho.ac.id/index.php/pamarenda/article/view/19318>
- Mulyadi, D. (2015). *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Mustaghfiroh, S. I. (2022). Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Mewujudkan Ketahanan Ekonomi Keluarga.  
<http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/27677>
- Mutia, C. (2022). Jumlah Penduduk RI Tembus 275,77 Juta.  
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/07/07/>
- Nabila, R., Erowati, D., & Manar, D. G. (2023). Efektivitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kabupaten Brebes. *Journal of Politic and Government Studies*, 1–36.  
<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/download/38837/29100>
- Nugroho, R. D. (2004). *Analisis Kebijakan*. Jakarta: PT Alex Media.
- Nurdiana, H., Saputri, M. E., & Ningtias, I. C. K. (2023). Dampak PKH Terhadap Kesejahteraan Keluarga. *TUTURAN*, 1(2), 136–158.  
<https://doi.org/10.47861/tuturan.v1i2.171>
- Nurul, N., & Lestari, H. (2019). Efektivitas PKH di Kelurahan Rowosari. *Journal of Public Policy and Management Review*, 8(2), 69–87.
- Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan.
- Prayitna, R., Nurhaeni, I., & Demartoto, A. (2018). Evaluasi PKH Dalam Meningkatkan Keberdayaan Perempuan. *Jurnal Administrasi Publik*, 13(1).  
<https://ejournal3.undip.ac.id/>

- [ndex.php/jppmr/article/download/26141/23186](https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/download/26141/23186)
- Putri, E. S. (2021). Manajemen Pelaksanaan PKH di Kabupaten Padang Pariaman. *Jurnal Administrasi Publik Dan Pembangunan*, 3(2), 79–84.
- Putri, N. A., & Purnaweni, H. (2021). Implementasi PKH di Kecamatan Bojonegoro. *Journal of Public Policy and Management Review*, 10(3). <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/31520>
- Ramadhani, A. D., & Yuliani, S. (2022). Pemberdayaan Perempuan Melalui PKH. *Wacana Publik*, 2(2), 390. <https://doi.org/10.20961/wp.v2i2.66548>
- Rengkuan, G., Dilapanga, A., & Rantung, M. (2022). Evaluasi PKH di Minahasa. *Jurnal Kajian Kebijakan dan Ilmu Administrasi Negara*, 4(1).
- Rizaldi, A., Nur, A., & Nazaki. (2021). Evaluasi PKH di Tanjungpinang. *Student Online Journal*, 2(1), 171–180.
- Rosdiana, A., Apriani, F., & Paselle, E. (2020). Evaluasi PKH di Kutai Barat. *EJournal Administrasi Publik*, 8(1), 9005–9017.
- Sari, A. G., & Marom, A. (2019). Evaluasi PKH di Kecamatan Semarang Utara. *Journal of Public Policy and Management Review*, 10(6). <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/download/26141/23186>
- Sari Muliana, F., Swandari, F., & Effendi, M. (2020). Dampak PKH di Kabupaten Barito Kuala. *Jurnal Syntax Transformation*, 1(10), 79–88.
- Setyawardani, D. T. R., Paat, C. J., & Lesawengen, L. (2020). Dampak PKH terhadap Masyarakat Miskin. *Jurnal*

*Kebijakan Publik*, 13(2), 1–  
14.

Silalahi, U. (2010). *Administrasi  
Publik*. Bandung: Refika  
Aditama.

Sugiyono. (2016 & 2020). *Metode  
Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan  
R&D*. Bandung: Alfabeta.